

ABSTRAK

Penumpukan sampah akibat pengelolaan yang tidak tepat menjadi permasalahan pelik di Indonesia. Padatnya populasi di perkotaan, gaya hidup konsumtif, serta rendahnya kualitas infrastruktur pengelolaan sampah dan jumlah lahan yang terbatas membuat Indonesia menjadi salah satu produsen sampah padat terbesar di dunia. Peningkatan volume sampah dan keterbatasan anggaran di daerah mendorong pemerintah kota untuk mengadopsi skema *Public Private Partnership* (PPP/KPBU) dalam proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTSa) sebagai upaya pemanfaatan sampah. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 mengatur tentang percepatan pembangunan infrastruktur PSEL di 12 kota di Indonesia, termasuk Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KPBU pada proyek PLTSa Surakarta menggunakan kerangka kerja Amirudin et al. (2023) serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada sektor publik, swasta, dan pakar, serta observasi lapangan. Penelitian ini melihat bahwa implementasi KPBU PLTSa Surakarta yang dijalankan tanpa *tipping fee* merupakan hasil dari proses panjang sejak tahap perencanaan hingga operasional yang menuntut komitmen penuh dari sektor publik dan swasta. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya pembagian peran, komitmen, tujuan, dan aktivitas yang jelas antar pemangku kepentingan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat faktor kunci yang memengaruhi implementasi proyek ini yaitu pembiayaan yang memadai, kerangka regulasi yang responsif, alokasi risiko yang tepat, dan dukungan politik yang stabil. Dukungan politik terbukti menjadi faktor pendorong utama yang memungkinkan proyek ini tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan teknis. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan proyek KPBU pengelolaan sampah di Indonesia.

Kata Kunci: *Public Private Partnership*, Pengelolaan Sampah, PLTSa Surakarta, *Critical Success Factors*.

ABSTRACT

Improper waste management has become a critical issue in Indonesia. Rapid urban population growth, a consumerist lifestyle, limited land availability, and underdeveloped waste infrastructure have positioned the country among the world's largest producers of solid waste. In response to increasing waste volumes and local budget constraints, municipal governments have adopted Public-Private Partnership (PPP) schemes in Waste-to-Energy (WtE) projects. Presidential Regulation No. 35/2018 outlines the acceleration of WtE infrastructure in 12 cities, including Surakarta. This study analyzes the PPP implementation in the Surakarta WtE project using Amirudin et al.'s (2023) framework and identifies key factors influencing its execution. A descriptive qualitative method and case study approach were employed, with data collected through interviews with public and private stakeholders, expert, and field observations. Findings reveal that the project, which was executed without a tipping fee, resulted from a lengthy process from planning to operations that demanded strong commitment from both public and private sectors. The study emphasizes the importance of clearly defined roles, commitments, goals, and activities among stakeholders. Four critical success factors were identified: adequate financing, a responsive regulatory framework, appropriate risk allocation, and stable political support. Political backing emerged as a decisive enabler, allowing the project to proceed despite financial and technical limitations. This study offers conceptual and practical contributions to advancing PPP-based waste management initiatives in Indonesia.

Keywords: Public-Private Partnership, Waste Management, Surakarta WtE, Critical Success Factors.